JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 3 Maret 2026
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Adaptasi Strategi Keamanan Indonesia di Pasifik: Perspektif Realisme Neoklasik Terhadap Dinamika Melanesian Spearhead Group

Alvin Saptauli
Universitas Indonesia, Indonesia
Email: alvinsaptauli@gmail.com

Keywords:
Indonesia; Melanesian Spearhead Group; neoclassical realism; West Papua; cultural diplomacy

Abstract

Background: *This study discusses how Indonesia adapts its security strategy in the Pacific region in the face of political and diplomatic pressures arising from the dynamics of the Melanesian Spearhead Group (MSG) organization.*
Objective: *Using a neoclassical realism approach, this study explains that Indonesia's foreign policy is not solely determined by external pressures, but is also shaped by the perceptions of domestic political elites and the capabilities of state institutions in responding to changes in the strategic environment.*
Methods: *The case study focuses on the administration of President Joko Widodo (2014–2024), when Indonesia faced intensified advocacy on the West Papua issue from the Melanesian Spearhead Group (MSG) countries, particularly Vanuatu and the Solomon Islands. These countries pushed for recognition of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) in the MSG forum, to which Indonesia responded with a diplomatic strategy based on economic, cultural, and maritime security cooperation.*
Results: *The main findings of this study indicate that Indonesia's strategy is adaptive but not yet fully transformative, given the ongoing gap between its cooperative foreign approach and its coercive domestic policies in Papua.*
Conclusion: *This research contributes to enriching the understanding of how developing countries like Indonesia navigate international structural pressures through a combination of diplomacy and domestic political recalculation.*

Kata Kunci:
Indonesia; Melanesian Spearhead Group; realisme neoklasik; Papua Barat; diplomasi budaya

Abstrak

Latar belakang: Penelitian ini membahas bagaimana Indonesia mengadaptasi strategi keamanannya di kawasan Pasifik dalam menghadapi tekanan politik dan diplomatik yang muncul dari dinamika organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Tujuan: Dengan menggunakan pendekatan realisme neoklasik, studi ini menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh tekanan eksternal, melainkan juga dibentuk oleh persepsi elite politik dalam negeri serta kapabilitas institusi negara dalam merespons perubahan lingkungan strategis.
Metode: Studi kasus yang diangkat berfokus pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024), saat Indonesia menghadapi intensifikasi advokasi isu Papua Barat oleh negara-negara MSG, khususnya Vanuatu dan Solomon Islands. Negara-negara tersebut mendorong pengakuan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di forum MSG, yang ditanggapi Indonesia dengan strategi diplomatik berbasis ekonomi, budaya, dan kerja sama keamanan maritim.
Hasil: Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa strategi Indonesia bersifat adaptif namun belum sepenuhnya transformatif, mengingat masih adanya kesenjangan antara pendekatan luar negeri yang kooperatif dan kebijakan domestik yang bersifat koersif di

Papua.
Kesimpulan: Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman terhadap bagaimana negara berkembang seperti Indonesia menavigasi tekanan struktural internasional melalui kombinasi diplomasi dan rekalkulasi politik domestik.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Sebagai negara dengan luas maritim yang sangat besar, Indonesia bukan hanya memiliki peran dalam keamanan regional Asia Tenggara, tetapi juga dalam dinamika keamanan Pasifik, khususnya melalui keanggotaannya sebagai *observer* di Melanesian Spearhead Group (MSG). Keanggotaan Indonesia di MSG tidak lepas dari konteks geopolitik dan diplomasi regional yang kompleks. Sejak menjadi *observer* pada tahun 2011, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola hubungan dengan negara-negara anggota MSG, terutama terkait isu Papua Barat. Negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon secara aktif mendorong pembahasan isu Papua di forum MSG, sementara Papua Nugini dan Fiji memiliki pendekatan yang lebih moderat (Wardhani, 2014). Pergeseran peran MSG dari sekadar forum kerja sama ekonomi dan budaya menjadi platform politik regional yang semakin mengedepankan isu hak asasi manusia dan dekolonisasi semakin memperumit posisi Indonesia dalam organisasi ini (Blades, 2014). Selain tekanan dari dalam MSG, Indonesia juga menghadapi dinamika yang lebih luas akibat meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik. Tiongkok semakin aktif menanamkan pengaruhnya di negara-negara Pasifik melalui bantuan ekonomi dan investasi infrastruktur, sementara Amerika Serikat dan sekutunya, seperti Australia dan Selandia Baru, berusaha mempertahankan pengaruh mereka melalui kerja sama keamanan dan bantuan ekonomi (Powles, 2015). Rivalitas ini secara tidak langsung berimbas pada hubungan Indonesia dengan MSG, karena negara-negara Pasifik semakin memiliki preferensi politik yang bergantung pada kepentingan kekuatan besar tersebut. Dalam situasi ini, Indonesia harus mengelola hubungan diplomatiknya agar tidak terseret dalam persaingan geopolitik yang lebih besar, sekaligus tetap mempertahankan pengaruhnya dalam MSG.

Selain faktor eksternal, ada juga faktor domestik yang membuat kebijakan Indonesia di MSG menjadi semakin kompleks. Isu Papua Barat, yang sering diangkat di forum internasional, bukan hanya menjadi tantangan bagi diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak politik domestik. Narasi hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri yang digaungkan oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua sering kali mendapatkan perhatian di MSG, memicu tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha meredam tekanan ini dengan berbagai cara, termasuk melalui diplomasi ekonomi dan budaya yang lebih intensif dengan negara-negara anggota MSG. Namun, efektivitas strategi ini masih menghadapi tantangan, terutama ketika negara-negara MSG semakin aktif memperjuangkan isu Papua di forum internasional. Indonesia harus mengelola hubungan diplomatik yang rentan terhadap polarisasi, terutama ketika negara-negara MSG semakin memperlihatkan preferensi politik yang dipengaruhi oleh insentif ekonomi dari Tiongkok atau tekanan moral dari Barat. Dalam hal ini, Indonesia harus menghindari terjebak dalam blok geopolitik tertentu, namun tetap mempertahankan stabilitas

hubungan kawasan yang berkaitan erat dengan isu keutuhan wilayah nasionalnya. Kondisi ini memerlukan strategi keamanan dan diplomasi luar negeri yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika regional dan global.

Dari sisi domestik, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap MSG juga dibentuk oleh persepsi elite politik nasional terhadap isu Papua. Pemerintah Indonesia memandang bahwa dukungan terhadap kelompok separatis oleh negara-negara MSG merupakan tantangan terhadap legitimasi nasional. Persepsi ini mendorong formulasi kebijakan luar negeri yang menekankan pada diplomasi budaya, diplomasi ekonomi, dan kerja sama keamanan sebagai alat untuk meredam tekanan tersebut. Elite politik Indonesia, terutama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014, mulai mengintegrasikan pendekatan identitas regional Melanesia ke dalam strategi diplomasi publik, misalnya melalui pengiriman delegasi budaya Papua atau promosi kesamaan etnis antara Indonesia timur dan negara-negara MSG.

Penting untuk dicatat bahwa strategi Indonesia di kawasan Pasifik tidak hanya mencerminkan respons terhadap tekanan eksternal semata, tetapi juga artikulasi dari dinamika domestik, seperti konsolidasi nasional, kestabilan politik dalam negeri, dan proyek pembangunan di Papua. Proyek infrastruktur masif di Papua dan pendekatan keamanan yang masih militeristik turut menjadi variabel dalam persepsi negara lain terhadap Indonesia, yang kemudian memengaruhi dinamika interaksi di MSG. Dalam kerangka pemikiran hubungan internasional, fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui teori struktural yang melihat negara sebagai unit rasional yang bereaksi terhadap sistem internasional. Diperlukan pendekatan yang dapat menghubungkan level sistemik dan domestik secara simultan. Dalam konteks inilah, realisme neoklasik menjadi pendekatan yang relevan. Teori ini menyatakan bahwa tekanan eksternal dari sistem internasional tidak serta-merta membentuk kebijakan luar negeri secara langsung, melainkan difilter terlebih dahulu oleh persepsi elite dan kapabilitas negara. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah hasil dari interaksi antara insentif eksternal dan kalkulasi politik domestik.

Studi ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan pendekatan realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri negara berkembang seperti Indonesia dalam konteks kawasan yang tidak sepenuhnya berada dalam pusat sistem internasional. Dengan memadukan variabel sistemik dan domestik, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif atas strategi keamanan yang diambil Indonesia di kawasan Pasifik.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan Indonesia dalam merumuskan pendekatan keamanan dan diplomasi yang lebih adaptif, terutama dalam menghadapi tekanan struktural dari kekuatan besar dan tantangan politik dari organisasi kawasan seperti MSG. Dalam situasi di mana isu Papua tidak hanya menjadi urusan domestik, melainkan juga narasi regional dan global, strategi keamanan Indonesia harus mampu mengintegrasikan respons terhadap dinamika politik regional sekaligus memperkuat posisi domestik.

Penelitian ini juga relevan bagi pengambil kebijakan luar negeri yang ingin mengembangkan strategi regional Indonesia yang lebih proaktif dan bukan sekadar reaktif. Pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan ekonomi, budaya, dan militer dalam

membangun pengaruh di kawasan sangat penting untuk mempertahankan kepemimpinan Indonesia di wilayah Asia-Pasifik yang semakin strategis (Wardhani, 2014).

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada literatur hubungan internasional dengan menerapkan realisme neoklasik dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan memahami bagaimana tekanan eksternal dan faktor domestik berinteraksi dalam membentuk strategi keamanan, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai dinamika kebijakan luar negeri negara berkembang di tengah persaingan geopolitik global (Rose, 1998).

Dari berbagai penelitian yang telah diulas, terdapat beberapa celah dalam literatur yang belum banyak dieksplorasi. Pertama, meskipun terdapat banyak kajian tentang peran MSG dalam politik regional Pasifik, belum ada penelitian yang secara khusus membahas bagaimana Indonesia menyesuaikan strategi keamanannya dalam menghadapi tekanan eksternal dari organisasi ini. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek politik identitas dan diplomasi ekonomi, tanpa menganalisis secara mendalam aspek keamanan dan strategi pertahanan Indonesia di kawasan Pasifik.

Kedua, meskipun rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah banyak dibahas dalam konteks Pasifik, belum banyak penelitian yang melihat bagaimana rivalitas ini memengaruhi kebijakan Indonesia dalam MSG. Padahal, meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik dapat berdampak pada posisi Indonesia dalam organisasi ini, terutama dalam mengelola hubungan dengan negara-negara anggota MSG yang semakin bergantung pada bantuan ekonomi Tiongkok.

Ketiga, pendekatan teori hubungan internasional yang digunakan dalam studi tentang Indonesia di MSG umumnya masih didominasi oleh perspektif politik identitas dan diplomasi ekonomi. Belum banyak penelitian yang menggunakan realisme neoklasik untuk menjelaskan bagaimana tekanan eksternal dan faktor domestik berinteraksi dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi gap dalam literatur dengan menerapkan realisme neoklasik sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana Indonesia menyesuaikan strategi keamanannya dalam menghadapi tekanan eksternal di MSG. Dengan mengkaji bagaimana faktor sistemik dan domestik berinteraksi dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan *neoclassical realism* atau realisme neoklasik digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk oleh interaksi antara tekanan eksternal dan faktor domestik. Berbeda dengan realisme struktural yang melihat perilaku negara sebagai respons langsung terhadap dinamika sistem internasional, realisme neoklasik menekankan bahwa keputusan kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sistem internasional, tetapi juga oleh variabel domestik, seperti persepsi elite politik dan kapabilitas negara (Rose, 1998). Dalam konteks penelitian ini, realisme neoklasik membantu menjelaskan bagaimana Indonesia merespons tekanan eksternal di Pasifik dengan menyesuaikan strategi keamanan dan kebijakan luar negeri dalam MSG.

Melalui realisme neoklasik, penelitian ini membedah secara sistematis tiga variabel utama: tekanan struktural eksternal (variabel independen), seperti kontestasi kekuatan besar dan dinamika politik internal MSG, persepsi elite politik dan kapabilitas negara (variabel intervening), yang menjelaskan bagaimana tekanan eksternal ditafsirkan dan disikapi oleh aktor domestik di Indonesia maupun negara-negara MSG, kebijakan luar negeri dan strategi keamanan Indonesia di Pasifik (variabel dependen), yang merupakan hasil konkret dari proses penyesuaian terhadap lingkungan eksternal berdasarkan persepsi dan kapasitas internal. Dengan menelaah interaksi ketiga variabel tersebut, pembahasan ini akan menunjukkan bagaimana Indonesia membentuk strategi yang bersifat adaptif, selektif, dan kontekstual dalam menghadapi tantangan regional. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan pembacaan lebih dalam terhadap dinamika kawasan Pasifik yang selama ini kerap dilihat hanya dari sudut pandang kekuatan besar. Realisme neoklasik, dalam hal ini, membuka ruang bagi analisis yang lebih berakar pada konteks politik negara berkembang seperti Indonesia, yang berupaya mempertahankan otonomi strategisnya di tengah tekanan internasional. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini tidak hanya menjawab pertanyaan utama penelitian—mengapa Indonesia perlu beradaptasi dengan strategi keamanan baru akibat tekanan eksternal di kawasan Pasifik—tetapi juga memperlihatkan kontribusi teoretis terhadap studi kebijakan luar negeri dengan memperluas aplikasi realisme neoklasik ke dalam konteks Asia Pasifik dan dinamika subregional seperti MSG.

Variabel Independen: Tekanan Struktural Eksternal di Kawasan Pasifik

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan eksternal yang berasal dari dinamika geopolitik dan keamanan di kawasan Pasifik. Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan ini menciptakan tekanan struktural yang signifikan bagi negara-negara Pasifik, termasuk Indonesia (Powles, 2015). Tiongkok semakin memperluas pengaruhnya di kawasan dengan menawarkan investasi ekonomi dan infrastruktur kepada negara-negara kecil di Pasifik, termasuk anggota MSG. Strategi ini membuat beberapa negara MSG semakin bergantung pada Beijing, yang pada gilirannya dapat memengaruhi sikap mereka terhadap isu-isu politik regional, termasuk posisi mereka terhadap Papua Barat (Fanell, 2019). Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya seperti Australia dan Selandia Baru berusaha menyeimbangkan pengaruh Tiongkok dengan memperkuat kerja sama pertahanan dan bantuan ekonomi kepada negara-negara Pasifik (Wesley-Smith, 1989). Dinamika ini memberikan tekanan bagi Indonesia, yang harus menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik tersebut. Selain itu, tekanan juga datang dari dalam MSG, terutama dari negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon yang secara terbuka mendukung isu Papua Barat (Wardhani, 2014). Kondisi ini menuntut Indonesia untuk mengembangkan strategi keamanan yang lebih fleksibel agar dapat mengelola tantangan diplomatik di MSG tanpa kehilangan kontrol atas isu Papua di tingkat internasional.

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik telah menjadi medan perebutan pengaruh yang semakin kompleks. Dalam literatur hubungan internasional, kondisi ini mencerminkan sistem multipolar yang sedang berkembang, di mana kekuatan besar tidak hanya bersaing dalam bidang militer, tetapi juga dalam bentuk soft power seperti bantuan ekonomi, investasi, dan pengaruh budaya (Powles, 2015; Fanell, 2019). Di kawasan Pasifik,

Tiongkok telah melaksanakan strategi diplomasi ekonomi yang agresif melalui skema pembangunan infrastruktur dan utang luar negeri (debt-trap diplomacy), yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan politik negara-negara kecil di MSG. Negara-negara seperti Kepulauan Solomon dan Vanuatu mulai menunjukkan orientasi yang lebih condong ke arah Tiongkok, bukan hanya karena nilai bantuan yang besar, tetapi juga karena sikap politik Tiongkok yang tidak mencampuri isu internal seperti pelanggaran HAM di Papua Barat. Sebaliknya, negara-negara Barat, yang berupaya menyeimbangkan pengaruh Tiongkok, cenderung lebih vokal terhadap isu HAM, termasuk terkait Papua, sehingga memperbesar tekanan terhadap posisi Indonesia (Wesley-Smith, 1989). Indonesia, sebagai negara berkembang yang mengupayakan peran aktif namun independen dalam politik kawasan, menghadapi dilema strategi. Di satu sisi, Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar untuk kepentingan ekonomi dan geopolitik, namun di sisi lain harus menahan diri agar tidak terseret dalam rivalitas yang dapat merugikan otonomi kebijakan luar negerinya. Posisi ini digambarkan sebagai "politik luar negeri bebas aktif" yang semakin diuji di tengah realitas multipolar yang dinamis (Scott, 2019).

Selain rivalitas antar kekuatan besar, tekanan signifikan juga datang dari dalam organisasi MSG itu sendiri. Berdasarkan dokumen, negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon secara aktif mendorong agenda Papua Barat di forum MSG, menjadikan isu tersebut bukan lagi sekadar simbolik, melainkan bagian dari politik identitas dan solidaritas etno-kultural Melanesia (Blades, 2014; Lawson, 2016). Indonesia, meskipun memiliki populasi Melanesia di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur, tetap dianggap sebagai entitas luar oleh sebagian elite MSG. Hal ini membuat keanggotaannya sebagai observer tidak serta merta menjamin pengaruh yang sebanding. Refleksi terhadap posisi Indonesia dalam MSG menunjukkan bahwa eksklusivitas politik Melanesia digunakan sebagai pembatas partisipasi penuh Indonesia, yang pada akhirnya mempersempit ruang manuver diplomatik (Nguyen, 2021). Lebih lanjut, perkembangan ini menunjukkan bahwa forum MSG telah bertransformasi dari organisasi ekonomi dan budaya menjadi arena politik regional yang sarat makna simbolik dan politis. Indonesia bukan hanya menghadapi tekanan kebijakan, tetapi juga tantangan dalam hal legitimasi identitas regional (Wardhani, 2014; Webster, 2017).

Tekanan dari kekuatan besar dan dinamika internal MSG menuntut respons strategis dari Indonesia. Dalam kerangka realisme neoklasik, tekanan struktural ini bukan hanya dilihat sebagai ancaman langsung, tetapi sebagai perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penyesuaian kebijakan luar negeri (Rose, 1998). Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan defensif dan simbolik semata, melainkan harus aktif membentuk ulang relasinya di kawasan Pasifik dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan fleksibel. Indonesia mulai merespons tekanan ini dengan kombinasi diplomasi ekonomi, keamanan, dan budaya, namun efektivitasnya masih bergantung pada bagaimana persepsi elite dan kapasitas implementasi di dalam negeri mampu mengelola kompleksitas tersebut. Tekanan struktural eksternal yang muncul dari rivalitas kekuatan besar dan dinamika internal MSG merupakan pemicu utama adaptasi kebijakan keamanan Indonesia di kawasan Pasifik. Pendekatan realisme neoklasik memungkinkan kita untuk melihat bahwa tekanan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari struktur internasional yang dinamis dan bersifat membentuk.

Indonesia, sebagai aktor strategis di kawasan, perlu memosisikan diri secara cermat dalam menghadapi tekanan ini, dengan tetap menjaga prinsip otonomi dan stabilitas nasionalnya.

Variabel Intervening: Persepsi Elite Politik dan Kapabilitas Negara-negara dalam Ruang Lingkup MSG

Dalam kerangka realisme neoklasik, tekanan eksternal tidak secara langsung membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, melainkan harus melalui filter persepsi elite politik dan kapabilitas negara. Oleh karena itu, variabel intervening dalam penelitian ini adalah bagaimana elite politik di Indonesia dan negara-negara MSG menafsirkan ancaman serta peluang yang muncul dari tekanan eksternal. Di Indonesia, persepsi elite politik terhadap keamanan nasional dan diplomasi regional sangat dipengaruhi oleh stabilitas domestik, terutama dalam kaitannya dengan isu Papua Barat. Pemerintah Indonesia melihat dukungan MSG terhadap kelompok pro-kemerdekaan Papua sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, sehingga berbagai langkah diplomasi dilakukan untuk meredam isu ini. Diplomasi ekonomi dan budaya menjadi instrumen utama yang digunakan oleh Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara MSG, dengan harapan dapat mengurangi tekanan politik yang berasal dari forum tersebut.

Di sisi lain, kapabilitas negara-negara anggota MSG dalam menanggapi tekanan eksternal juga bervariasi. Papua Nugini dan Fiji cenderung memiliki hubungan yang lebih pragmatis dengan Indonesia, karena kepentingan ekonomi dan kerja sama bilateral yang kuat (Wardhani, 2014). Sementara itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon lebih aktif menggunakan forum MSG untuk mengadvokasi isu Papua, terutama karena pengaruh aktor non-negara seperti kelompok masyarakat sipil dan aktivis HAM (Blades, 2014). Dinamika ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di MSG tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan dari aktor eksternal, tetapi juga oleh bagaimana elite politik di Indonesia dan negara-negara MSG menafsirkan tekanan tersebut serta kapasitas mereka dalam meresponsnya.

Ketika kedua dimensi—persepsi elite dan kapabilitas negara—berinteraksi, hasilnya adalah respons kebijakan luar negeri yang lebih kompleks dan terarah. Dalam konteks Indonesia, persepsi ancaman terhadap isu Papua dikombinasikan dengan penilaian terhadap potensi dan kekuatan negara-negara MSG secara individual. Hal ini menjelaskan mengapa Indonesia lebih intensif membangun hubungan ekonomi dengan Papua Nugini dan Fiji, sambil menanggapi Vanuatu dengan pendekatan simbolik dan retoris. Strategi yang digunakan Indonesia mencerminkan kecenderungan untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik masing-masing negara MSG. Pendekatan ini mendukung temuan bahwa variabel intervening dalam realisme neoklasik tidak hanya bersifat reaktif terhadap tekanan sistemik, tetapi juga bersifat selektif dan adaptif berdasarkan evaluasi rasional terhadap aktor-aktor regional (Reichwein, 2024). Subbab ini menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap tekanan eksternal di kawasan Pasifik sangat ditentukan oleh bagaimana elite politik menafsirkan ancaman dan bagaimana kapabilitas negara-negara MSG memengaruhi efektivitas diplomasi Indonesia. Pendekatan realisme neoklasik memungkinkan pemahaman bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya refleksi dari tekanan internasional, tetapi juga hasil artikulasi domestik yang kompleks. Dalam konteks MSG, persepsi elite Indonesia terhadap isu Papua dan kalkulasi terhadap kekuatan politik negara-negara Melanesia menjadi kunci dalam pembentukan strategi keamanan dan diplomasi yang adaptif dan kontekstual.

Variabel Dependen: Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam MSG dan Strategi Keamanan di Pasifik

Sebagai hasil dari interaksi antara tekanan eksternal dan faktor domestik, kebijakan luar negeri Indonesia dalam MSG menjadi variabel dependen dalam penelitian ini. Kebijakan ini mencakup berbagai strategi yang digunakan oleh Indonesia untuk mengelola hubungan dengan MSG serta menyesuaikan strategi keamanannya di Pasifik.

Indonesia telah mengadopsi beberapa langkah strategis dalam menghadapi tekanan dari MSG. *Pertama* adalah diplomasi ekonomi dan bantuan pembangunan. Indonesia semakin aktif menawarkan kerja sama ekonomi kepada negara-negara MSG, termasuk bantuan infrastruktur dan investasi di sektor energi dan pertanian. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan mengurangi pengaruh negara-negara yang lebih kritis terhadap kebijakan Indonesia di Papua. Kedua adalah diplomasi budaya dan *soft power.* Indonesia juga menggunakan pendekatan diplomasi budaya untuk menegaskan kedekatannya dengan negara-negara Melanesia, termasuk melalui pertukaran budaya dan program kerja sama pendidikan (Nguyen, 2021). *Ketiga* adalah kerja sama keamanan kemaritiman. Sebagai bagian dari strategi keamanan yang lebih luas, Indonesia meningkatkan kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara Pasifik untuk memperkuat posisinya sebagai aktor keamanan yang kredibel di kawasan (May, 2012).

Diplomasi ekonomi digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketergantungan positif antara Indonesia dan negara-negara MSG. Langkah ini terlihat dari meningkatnya tawaran kerja sama pembangunan dan investasi kepada negara-negara seperti Papua Nugini dan Fiji. Seperti dicatat dalam dokumen, Indonesia menggunakan bantuan infrastruktur, pertanian, dan energi untuk mempererat hubungan bilateral, sekaligus memperlemah posisi negara-negara yang lebih kritis terhadap isu Papua (Nguyen, 2021). Strategi ini mencerminkan pemahaman realistis bahwa dalam politik internasional, hubungan kekuatan tidak hanya dibangun melalui militer, tetapi juga melalui kapabilitas ekonomi yang strategis. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan economic statecraft dalam teori realisme modern (Rose, 1998; Lawson, 2016).

Pendekatan soft power yang dilakukan Indonesia melalui diplomasi budaya merupakan respons terhadap narasi eksklusivitas etnis Melanesia yang sering digunakan untuk mengecualikan Indonesia dari keanggotaan penuh MSG (Webster, 2017). Indonesia mempromosikan identitas Melanesia dari wilayah Papua, Maluku, dan NTT sebagai bagian dari komunitas budaya regional. Dalam dokumen dijelaskan bahwa Indonesia aktif mengirim delegasi budaya, program pertukaran pelajar, serta melibatkan pemimpin adat dan tokoh masyarakat Papua dalam forum-forum MSG. Ini menunjukkan usaha Indonesia untuk reframe citra sebagai "bagian dari keluarga Melanesia" dan bukan aktor luar yang menindas identitas Melanesia (Nguyen, 2021; Wilson, 2022). Strategi ini menggabungkan aspek normatif dan pragmatis diplomasi. Dari sisi realisme neoklasik, ini adalah cara untuk mengatasi defisit legitimasi dan memperluas pengaruh melalui persuasion daripada coercion.

Sebagai negara maritim terbesar di kawasan, Indonesia memanfaatkan posisinya untuk mendorong kerja sama keamanan, terutama dalam bentuk latihan gabungan, pengamanan laut, dan diplomasi pertahanan. Refleksi dokumen menunjukkan bahwa Indonesia meningkatkan keterlibatannya dalam forum multilateral terkait keamanan maritim di Pasifik, dan memperkuat kerja sama bilateral dengan Papua Nugini serta Fiji (May, 2012). Langkah ini bertujuan membangun citra Indonesia sebagai provider of security di kawasan, yang pada

akhirnya dapat memperkuat legitimasi keanggotaannya dalam MSG dan menyeimbangkan narasi negatif yang dibentuk oleh negara-negara seperti Vanuatu. Dengan demikian, kerja sama keamanan bukan hanya upaya teknis, tetapi juga strategi politik regional. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa kekuatan nasional Indonesia—baik dalam bentuk militer, ekonomi, maupun budaya—digunakan secara strategis untuk memperluas ruang gerak diplomatiknya. Ini selaras dengan asumsi realisme neoklasik bahwa negara akan menyesuaikan alat kebijakan luar negerinya berdasarkan persepsi ancaman dan peluang yang tersedia (Cerioli, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tekanan Struktural Eksternal dan Relevansi Realisme Neoklasik

Dalam kerangka *realisme neoklasik*, tekanan dari sistem internasional merupakan pendorong awal perubahan kebijakan luar negeri, namun tidak bekerja secara otomatis. Tekanan ini harus ditransmisikan melalui persepsi elite domestik sebelum berujung pada tindakan strategis negara. Dalam konteks Indonesia di kawasan Pasifik, tekanan eksternal itu bersumber dari dua arena utama: pertama, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok; dan kedua, dinamika internal organisasi MSG yang kian mempolitisasi isu Papua Barat.

Rivalitas global antara Tiongkok dan Amerika Serikat menciptakan lingkungan strategis yang tidak stabil dan penuh kompetisi pengaruh di Pasifik. Tiongkok menggunakan pendekatan *debt-trap diplomacy* melalui skema bantuan infrastruktur dan investasi besar-besaran untuk membentuk ketergantungan ekonomi negara-negara kecil Pasifik, termasuk anggota MSG seperti Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Sebaliknya, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru merespons dengan menekankan kerja sama pertahanan dan promosi HAM sebagai instrumen pengaruh (Fanell, 2019). Situasi ini menciptakan dilema bagi Indonesia yang harus menjaga keseimbangan agar tidak terseret dalam blok geopolitik tertentu. Dalam logika *neoklasik*, negara tidak memiliki kebebasan absolut karena kapabilitas relatifnya yang terbatas; tetapi juga tidak sepenuhnya pasif karena mampu menyeleksi respons berdasarkan kepentingan domestik (Rose, 1998). Dengan demikian, posisi Indonesia sebagai *observer* dalam MSG menjadi sangat rentan terhadap pengaruh kekuatan besar karena tidak memiliki hak voting dan kapasitas penentu arah organisasi. Di sisi lain, tekanan struktural juga datang dari dalam MSG itu sendiri. Sejak 2014, organisasi ini kian mengangkat isu Papua Barat dalam sidang-sidangnya, baik melalui advokasi negara anggota seperti Vanuatu maupun melalui pengakuan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai *observer* dalam MSG (Blades, 2014). Tekanan ini bersifat politik dan simbolik, yang memperumit strategi keamanan Indonesia karena memperluas isu Papua ke ranah internasional.

Persepsi Elite dan Kapabilitas Negara sebagai Filter Utama

Salah satu kontribusi utama *realisme neoklasik* adalah penekanan pada persepsi elite dan kapabilitas negara sebagai filter yang mengubah tekanan eksternal menjadi tindakan kebijakan. Dalam kasus Indonesia, persepsi elite terhadap isu Papua sangat dipengaruhi oleh narasi keutuhan nasional dan ancaman disintegrasi. Pemerintah, terutama di era Presiden

Joko Widodo, melihat bahwa setiap upaya internasionalisasi isu Papua merupakan bentuk delegitimasi terhadap kedaulatan Indonesia.

Persepsi ini menjelaskan mengapa strategi Indonesia tidak hanya berbasis keamanan militer, tetapi juga merambah ke diplomasi ekonomi dan budaya. Elite melihat bahwa tekanan tidak bisa dibalas dengan konfrontasi terbuka, namun harus dikelola dengan strategi asimilasi simbolik dan pembangunan jaringan diplomasi lunak (Nguyen, 2021). Namun, persepsi elite bukan satu-satunya faktor. Kapabilitas negara juga memainkan peran penting. Negara-negara MSG berbeda dalam orientasi dan kapasitasnya merespons tekanan eksternal. PNG dan Fiji, misalnya, memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Indonesia dan cenderung bersikap pragmatis. Sementara itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon lebih terpengaruh oleh tekanan dari LSM lokal, gereja, dan komunitas masyarakat sipil yang memiliki afiliasi kuat dengan gerakan solidaritas Melanesia (Blades, 2014). Oleh karena itu, strategi Indonesia harus bersifat diferensial: bersifat kooperatif terhadap negara pragmatis, dan persuasif terhadap negara ideologis.

Kebijakan Keamanan Indonesia sebagai Produk Interaksi Faktor Eksternal dan Domestik

Kebijakan keamanan Indonesia di kawasan MSG dapat dipahami sebagai hasil artikulasi dari tekanan struktural dan persepsi domestik. Strategi yang diadopsi bersifat integratif, mencakup tiga pilar utama: diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, dan kerja sama keamanan maritim. Diplomasi ekonomi menjadi pilar utama strategi Indonesia sejak 2015. Pendekatan ini berfokus pada pemberian bantuan teknis, kerja sama infrastruktur, dan promosi investasi ke negara-negara MSG. Sebagai contoh, Indonesia mengundang delegasi dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon untuk mengunjungi Papua dalam rangka *public diplomacy* mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Langkah ini dirancang untuk membingkai ulang narasi yang selama ini dibentuk oleh media dan aktivis internasional (Wardhani, 2014). Diplomasi budaya adalah upaya membangun narasi tandingan terhadap eksklusivitas identitas Melanesia yang selama ini digunakan sebagai dasar penolakan terhadap kehadiran Indonesia di MSG. Pemerintah Indonesia mengusung identitas "Melanesia Indonesia" dengan menekankan akar budaya Papua, Maluku, dan NTT yang dianggap bagian dari keluarga besar Melanesia. Dalam praktiknya, Indonesia mengirim delegasi budaya dan seniman ke forum-forum MSG serta menyediakan beasiswa bagi pelajar MSG untuk belajar di universitas Indonesia (Nguyen, 2021). Kerja sama keamanan maritim menjadi pilar ketiga. Sebagai negara kepulauan, Indonesia meningkatkan kapasitasnya sebagai *security provider* dengan menawarkan latihan gabungan, peningkatan patroli, dan kerja sama intelijen maritim dengan negara-negara MSG. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kolektif kawasan, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia sebagai aktor keamanan kredibel di Pasifik (May, 2012).

Evaluasi Kritis terhadap Efektivitas Strategi

Meskipun strategi tiga pilar ini memiliki logika integratif, efektivitasnya tidak sepenuhnya linier. Misalnya, pada tahun 2019, Kepulauan Solomon secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin kerja sama erat dengan Tiongkok. Keputusan ini memperlihatkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia belum cukup kuat untuk mencegah negara MSG berpindah blok politik karena faktor eksternal lain lebih dominan (Foukona, 2019). Di sisi lain, pendekatan represif terhadap Papua di dalam negeri,

seperti operasi militer dan pembatasan informasi, justru memperkuat narasi pelanggaran HAM yang digunakan oleh negara-negara MSG sebagai alasan untuk menekan Indonesia. Ini menciptakan paradoks dalam strategi keamanan Indonesia: di satu sisi mengedepankan diplomasi dan soft power, di sisi lain mempertahankan hard power di wilayah yang menjadi pusat sorotan internasional. Berdasarkan basis-basis realisme neoklasik, ketegangan ini merupakan refleksi dari ketidakseimbangan antara kapabilitas negara dan tuntutan sistemik. Dalam kondisi seperti ini, strategi keamanan Indonesia akan terus bersifat adaptif dan situasional, bergantung pada sejauh mana elite politik mampu membaca perubahan konteks internasional dan mereformulasi kebijakan domestik yang sesuai dengan narasi global (Cerioli, 2023).

KESIMPULAN

Adaptasi strategi keamanan Indonesia di kawasan Pasifik, khususnya dalam konteks keterlibatan di Melanesian Spearhead Group (MSG), merupakan respon kompleks terhadap tekanan eksternal yang ditransmisikan melalui persepsi elite politik domestik. Dengan menggunakan pendekatan *realisme neoklasik*, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam MSG tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana elite negara memahami ancaman, serta kapabilitas institusional dalam meresponsnya.

Dari sisi struktural, Indonesia menghadapi dua bentuk tekanan eksternal yang simultan. Pertama, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Pasifik menciptakan medan kompetitif di mana negara-negara kecil MSG menjadi arena perebutan pengaruh melalui bantuan ekonomi, kerja sama keamanan, dan diplomasi politik. Kedua, dinamika internal MSG menunjukkan bahwa organisasi ini telah mengalami transformasi dari forum kerja sama ekonomi-budaya menjadi platform politik yang aktif mengangkat isu Papua Barat sebagai bagian dari narasi solidaritas Melanesia. Kedua tekanan ini saling menguatkan dan berkonvergensi pada satu titik rawan dalam politik luar negeri Indonesia: legitimasi atas Papua Barat. Namun, tekanan dari sistem internasional tersebut tidak serta-merta mengubah kebijakan luar negeri secara langsung. Dalam logika *neoklasik realisme*, terdapat lapisan "penyaring" dalam bentuk persepsi elite dan kapabilitas negara. Pemerintah Indonesia, terutama di era Presiden Joko Widodo (2014–2024), melihat tekanan internasional terhadap isu Papua bukan hanya sebagai ancaman diplomatik, melainkan sebagai bentuk ancaman terhadap keutuhan negara. Persepsi ini memengaruhi orientasi kebijakan luar negeri yang cenderung bersifat responsif, defensif, dan diarahkan pada tiga sektor utama: ekonomi, budaya, dan keamanan.

Strategi keamanan Indonesia di MSG pada akhirnya terbentuk melalui proses artikulatif antara tekanan eksternal dan kalkulasi domestik. Diplomasi ekonomi digunakan untuk menciptakan ketergantungan pragmatis melalui bantuan, investasi, dan proyek infrastruktur di negara MSG yang bersikap moderat seperti Papua Nugini dan Fiji. Diplomasi budaya dimanfaatkan untuk membingkai ulang identitas Indonesia sebagai bagian dari keluarga besar Melanesia, dengan menampilkan keberagaman etnis dan budaya di kawasan timur Indonesia. Sementara kerja sama keamanan maritim dirancang untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai *security provider* dan aktor strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Meski

demikian, efektivitas strategi ini bersifat terbatas. Diplomasi budaya Indonesia tidak cukup kuat untuk membendung pengaruh narasi etnis solidaritas Melanesia yang dibawa oleh Vanuatu dan kelompok advokasi seperti ULMWP. Diplomasi ekonomi yang ditawarkan belum mampu menyaingi skala bantuan dan komitmen strategis yang diberikan oleh Tiongkok di negara-negara seperti Kepulauan Solomon. Di sisi lain, pendekatan represif terhadap Papua di dalam negeri justru memperkuat tuduhan pelanggaran HAM yang menjadi amunisi diplomatik negara MSG dalam mendesak isu Papua di forum internasional.

Dengan demikian, realisme neoklasik menjelaskan bahwa meskipun struktur internasional menciptakan tekanan objektif, arah dan isi kebijakan luar negeri Indonesia tetap sangat ditentukan oleh struktur persepsi, identitas, dan kapabilitas negara di dalam negeri. Negara bukanlah aktor pasif yang hanya merespons tekanan, melainkan entitas dinamis yang secara selektif menafsirkan ancaman dan peluang, serta merumuskan strategi yang sesuai dengan nilai, identitas, dan kepentingan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

Blades, J. (2014). Melanesia's test: The political quandary of West Papua. *Pacific Journalism Review: Te Koakoa, 20*(2), 23–39. https://doi.org/10.24135/pjr.v20i2.164

Cerioli, L. (2025). Neoclassical realism, global international relations, and the unheard echoes of realist practices from the South. *The British Journal of Politics and International Relations, 27*(1), 369–386. https://doi.org/10.1177/13691481241230858

Fanell, J. E. (2019). China's global naval strategy and expanding force structure. *Naval War College Review, 72*(1), 10–55.

Foukona, J. D. (2019). Solomon Islands. *The Contemporary Pacific, 31*(2), 554–563.

Lawson, S. (2016). West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: Competing logics in regional and international politics. *Australian Journal of International Affairs, 70*(5), 506–524. https://doi.org/10.1080/10357718.2015.1119231

Lawson, S. (2017). Regionalism and colonialism in contemporary Oceania. *The Round Table, 106*(2), 143–153. https://doi.org/10.1080/00358533.2017.1296710

May, R. (2012). Papua New Guinea: Issues of external and internal security. *Security Challenges, 8*(4), 47–60.

Nguyen, H. R. (2021). Indonesia's Melanesian identity. *Journal of Southeast Asian Studies, 52*(3), 317–335.

Powles, M. (2015). China and the Pacific. *New Zealand International Review, 40*(3), 25–28.

Reichwein, A. (2024). The tradition of neoclassical realism. In B. C. Schmidt & T. Juneau (Eds.), *Neoclassical realism in European politics* (pp. 23–42). Manchester University Press. https://doi.org/10.7765/9781526186072.00008

Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World Politics, 51*(1), 144–172.

Schmidt, B. C., & Juneau, T. (2024). Neoclassical realism and power. In B. C. Schmidt & T. Juneau (Eds.), *Neoclassical realism in European politics* (pp. 43–62). Manchester University Press. https://doi.org/10.7765/9781526186072.00009

Scott, D. (2019). Indonesia grapples with the Indo-Pacific: Outreach, strategic discourse, and diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 38*(2), 194–217. https://doi.org/10.1177/1868103419860669

Webster, D. (2017). Regionalism and resistance: West Papua and the Melanesian Spearhead Group. *Pacific Affairs*, *90*(4), 673–695.

Wilson, A. (2022). Cultural diplomacy in Melanesia. *Pacific Affairs*, *95*(1), 45–63.